



Rumah Jabatan Terbuka 24 Jam

Bupati Soppeng Andi Soetomo sangat dekat dengan warganya. Dia siap menerima warga kapan pun dan di mana pun. Warga juga bebas menyampaikan masalah apa pun.

SELAMA menjabat Andi Soetomo, bupati Soppeng, membuka ruang interaksi bagi warganya untuk datang dan menemui di rumah jabatan. Terutama bila ada warga yang mempunyai masalah. Baik masalah pribadi maupun urusan dinas.

"Orang yang datang ke rumah pasti ada masalahnya. Jadi, rumah terbuka 24 jam untuk mendengar

keluhan warga," kata Andi Soetomo di kantor bupati baru-baru ini.

Dari segi pekerjaan, dia tipe pekerja ulat. Tidak boleh ada berkas yang terhambat. Dia pun terkadang menandatangani berkas di tempat mana pun. Kebiasaan itu dia tanyakan kepada pejabat di lingkungan Pemkab Soppeng.

"Pak bupati tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Tak boleh meja, jika tidak selesai di kantor, pekerjaan dilanjutkan di rumah," ujar staf bupati, Asni.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam pelayanan publik, khususnya masalah perizinan di daerah. Jika sebelumnya perizinan mencapai 55 jenis, kini dicutkan menjadi 19 jenis melalui kantor pelayanan terpadu (KPT).

Phak KPT ditekankan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengurus perizinan. Pelayanan sesuai *standard operating procedure* (SOP).

Dengan adanya SOP, diharapkan proses pemberian perizinan berjalan transparan, cepat, dan pasti.

"Soppeng menyederhanakan perizinan di daerah. Jika sebelumnya terdiri atas 55 jenis, kini dicutkan menjadi 19 jenis. Dengan penyederhanaan ini, perizinan tidak lagi berbelit-belit," tambah Soetomo.

Bahkan, sebagian perizinan sudah digratiskan. Terkecuali izin mendirikan bangunan (IMB), HO, dan izin perikanan. Dia menjelaskan, dengan penyederhanaan perizinan, diharapkan pelaku usaha mendapat kemudahan dalam berinvestasi. Dengan

begini, bisa tercipta iklim investasi yang kondusif.

Dalam pengelolaan keuangan, Pemkab Soppeng berhasil meraih prestasi. Setelah sempat menyandang predikat *disclaimer* dari BPK pada 2013, Pemkab terus bekerja maksimal melakukan pengelolaan aset dan tunggakan piutang. Pada 2014, Soppeng meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Torehan itu tidak membuat puas Pemkab. Bupati menginstruksi jajarannya menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Alhasil, pada 2015 ini, Soppeng berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf pengecualian (DPP).

"Untuk kali pertama, Soppeng berhasil meraih WTP. WTP ini

merupakan kado terakhirku bagi masyarakat Soppeng. Semoga bupati selanjutnya bisa mempertahankannya," ujar Soetomo.

Dari segi pembangunan, Pemkab Soppeng berusaha mengintegrasikan pembagian yang merata. Salah satunya, menerapkan penganggaran partisipatif. Ini diimplementasikan melalui Perbup Nomor 57/1/2015 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan.

Dengan penganggaran partisipatif, diharapkan tercipta pembangunan yang adil. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya kesan daerah tertentu kurang tersentuh pembangunan.

"Dengan adanya penganggaran partisipatif, urusan masyarakat bisa ditampung melalui musrenbang. Dan pembangunan lebih merata," tambahnya. (astriadi/c17/rom)